



KEMENTERIAN PERTANIAN
BPSI TANAMAN SEREALIA



LAPORAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTIKORUPSI (SPAK) BPSI TANAMAN SEREALIA TRIWULAN III 2024

**NOMOR : 1.10/HM.100/H.2.3/10/2024
TANGGAL : 1 OKTOBER 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN SURVEI PERSEPSI ANTIKORUPSI PENGGUNA LAYANAN DI BPSI TANAMAN SEREALIA

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021**

**Disahkan di Maros
Oktober 2024**

Kepala BPSI Tanaman Serealia

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, mengamanatkan fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tertuju pada dua sasaran yang utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). SPAK dan SPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja instansi pemerintah.

Survei tentang persepsi mitra kerja/pengguna layanan dan persepsi antikorupsi terhadap pelayanan yang diberikan, yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan dan antikorupsi BPSI Tanaman Serealia sebagai salah satu unit kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI.

Hasil survei tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi balai selaku penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan upaya perbaikan, sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera tercapai.

Maros, 1 Oktober 2024

Kepala BPSI Tanaman Serealia,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Landasan Hukum	2
E. Definisi	3
BAB II METODOLOGI SURVEI	4
A. Kriteria Responden	4
B. Metode Pencacahan	4
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	11
A. Kesimpulan	10
B. Tindak Lanjut	10
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi. Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permentan dan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efisien dan efektif sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat tepat dan professional. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian sebagai unit eselon 1 penyelenggara pelayanan publik maka penting dilakukan survei indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP) dan survey indeks persepsi antikorupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. IPKP dan IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instalasi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh transparansi internasional Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *Good Government*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkup Badan standardisasi instrumen pertanian.

B. Tujuan

Tujuan survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi antikorupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pada BPSI Tanaman Serealia sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

Sasaran survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi antikorupsi sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih akuntabel dan transparan
2. Tercapainya perbaikan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dilaksanakan secara bersih bebas dari korupsi kolusi nepotisme dan antigratifikasi

D. Landasan Hukum

Landasan hukum survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi antikorupsi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019

E. Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sembilan tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara
2. Swap
3. *Illegal profit*
4. *Secret transaction*
5. Hadiah
6. Hibah
7. Penggelapan
8. Kolusi
9. Nepotisme

BAB II METODOLOGI

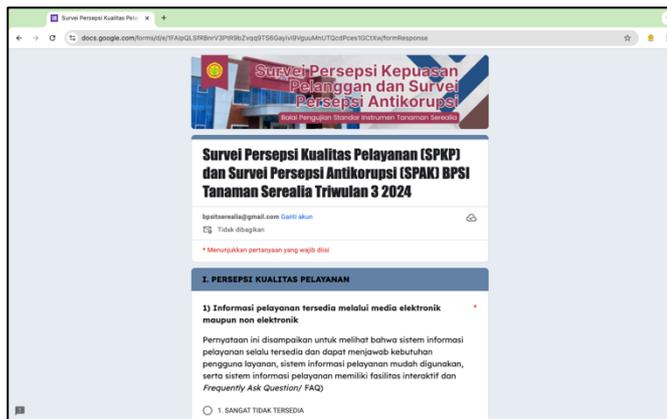
A. Kriteria Responden

Responden yang berpartisipasi dalam survei adalah pengguna jasa yang telah selesai (100%) menerima layanan di BPSI Tanaman Serealialia dalam Triwulan III 2024 (1 Juli – 30 September 2024).

B. Metode Pencacahan

Survei dilakukan dengan metode penyampaian kuesioner melalui surat dan/atau media komunikasi lainnya kepada para responden. BPSI Tanaman Serealialia melaksanakan survei dari tanggal 1 Juli – 30 September 2024, melalui tautan bit.ly/SPAKBSIPSerealialiaTW2.

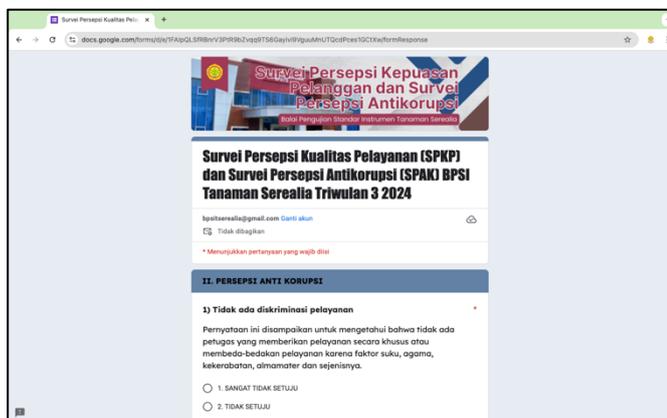
1. Tampilan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP)



The screenshot shows a Google Forms interface for a survey titled "Survei Persepsi Kepuasan Pelanggan dan Survei Persepsi Antikorupsi". The main heading is "Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) BPSI Tanaman Serealialia Triwulan 3 2024". Below the heading, there is a section titled "I. PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN" with a sub-heading "1) Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik". The text below asks respondents to evaluate the availability of information services through electronic and non-electronic media. A radio button is visible for the response "1. SANGAT TIDAK TERSEDIA".

Gambar 1. Tampilan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

2. Tampilan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK)



The screenshot shows the same Google Forms interface as Gambar 1, but with a different section highlighted. The section is titled "II. PERSEPSI ANTI KORUPSI" with a sub-heading "1) Tidak ada diskriminasi pelayanan". The text below asks respondents to evaluate whether there is discrimination in service based on factors like gender, religion, or social status. Radio buttons are visible for responses "1. SANGAT TIDAK SETUJU", "2. TIDAK SETUJU", and "3. SANGAT SETUJU".

Gambar 2. Tampilan Survei Persepsi Antikorupsi

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Skala pengukuran yang digunakan pada survei ini adalah skala *likert* dengan 6 pilihan. Skala *likert* merupakan skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan kuesioner yang telah diberikan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, menunjukkan semakin baik persepsi masyarakat terhadap kuesioner yang diberikan.

Data yang didapat dari hasil kuesioner dikonversikan menjadi nilai dengan 4 skala karena menggunakan skala Likert genap 4 poin yaitu empat, tiga, dua, dan satu. Presentase kelayakan didapat dengan menghitung secara matematis menggunakan persamaan rating scale seperti di bawah ini.

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) menggunakan skala 4, sedangkan kuesioner pada masing-masing survei menggunakan skala 6. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi nilai dari skala 6 ke skala 4.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Responden SPKP dan SPAK

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 68 responden, dengan identifikasi berikut:

Tabel 1. Rekap Indikator Responden SPKP dan SPAK

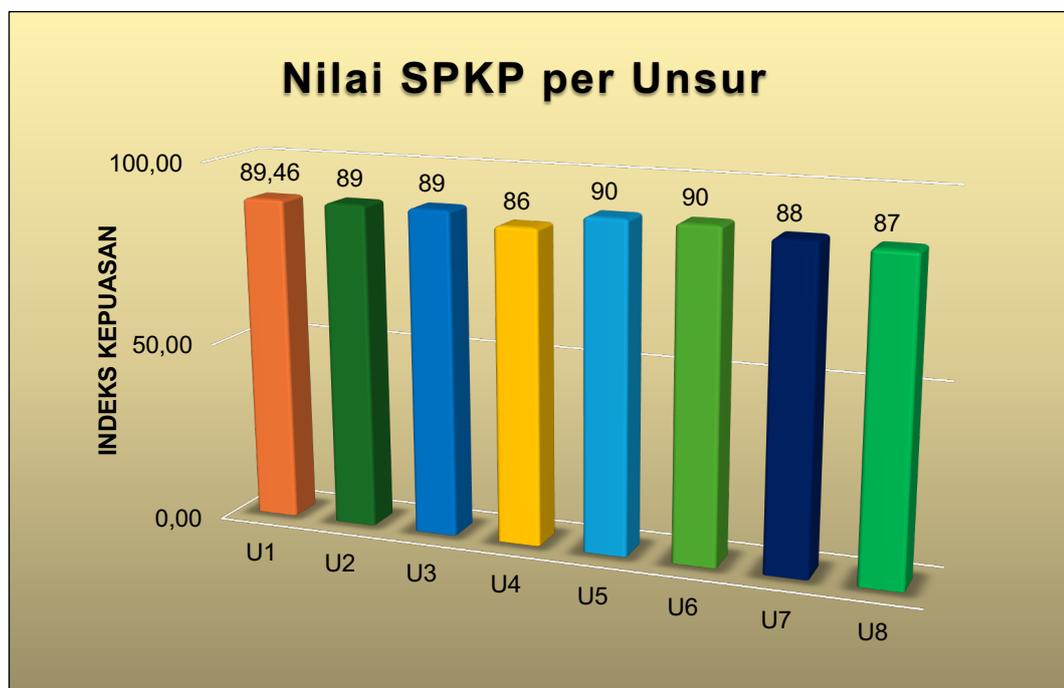
No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Usia	Kurang dari 20 tahun	11	33%
		20 s.d. 30 tahun	8	24%
		30 s.d. 40 tahun	8	24%
		40 s.d. 50 tahun	3	9%
		Lebih dari 50 tahun	3	9%
2	Jenis Kelamin	Laki - laki	30	44%
		Perempuan	38	56%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP/ sederajat	1	1%
		SMA/ sederajat	18	26%
		D3	2	3%
		S1/ sederajat	31	46%
		S2	13	19%
		S3	3	4%
4	Profesi	ASN	19	28%
		TNI/POLRI	0	0%
		Swasta	3	4%
		Wirausaha	2	3%
		Pelajar/ Mahasiswa	44	65%
		BUMN	0	0%
		DPR/DPD	0	0%
5	Layanan	Laboratorium Pengujian	1	1%
		Unit Pengelola Benih Sumber	23	34%
		Informasi Teknologi	7	10%
		Kunjungan/Studi Banding	17	25%
		Perpustakaan	1	1%
		Magang/PKL	19	28%

2. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Hasil pengolahan data Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ditampilkan pada Tabel 2 Rekap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2. Rekap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

No	Unsur Persepsi Kualitas Pelayanan	Rerata	%
1	Informasi Pelayanan	3,58	89,46
2	Persyaratan Pelayanan	3,58	89,46
3	Prosedur/Alur Pelayanan	3,58	89,46
4	Jangka Waktu	3,45	86,27
5	Tarif/Biaya Layanan	3,61	90,20
6	Sarana dan Prasarana	3,60	89,95
7	Respons Pelayanan	3,51	87,75
8	Konsultasi dan Pengaduan	3,47	86,76
Jumlah Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3,55	88,66



Gambar 3. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan per Unsur

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi data, diperoleh nilai IPKP sebesar **3,55** atau **88,66%** yang termasuk ke dalam kategori **Sangat Baik (88,31 – 100)**. Angka yang diperoleh lebih kecil 0,03 atau 0,73% dibandingkan nilai IPKP pada Triwulan 2. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa BPSI Tanaman Serealia harus terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan khususnya pada Triwulan 3.

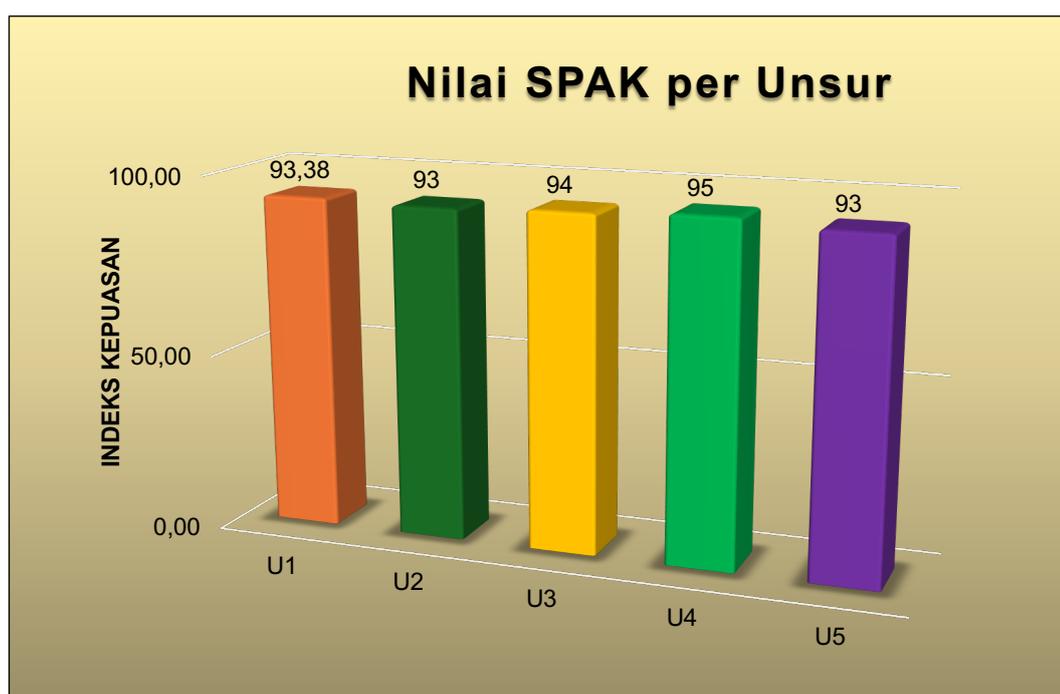
Namun terlihat unsur U4 yaitu **Jangka Waktu** kembali mendapatkan indeks penilaian yang paling kecil sebesar 3,45 atau 86,27% dibandingkan dengan unsur lainnya. Terlebih perolehan nilai pada unsur tersebut lebih rendah dari periode sebelumnya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Keadaan tersebut dimungkinkan karena **jangka waktu** penyelesaian pelayanan yang diberikan BPSI Tanaman Serealialia baik secara daring maupun luring masih belum sesuai dengan ekspektasi pengguna jasa. Maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada alur serta standar pelayanan publik.

3. Hasil Survei Persepsi Antikorupsi

Dari hasil pengolahan data SPAK, diperoleh nilai Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) sebesar 3,74, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rekap Indeks Persepsi Antikorupsi

No	Unsur Persepsi Antikorupsi	Rerata	%
1	Diskriminasi Pelayanan	3,74	93,38
2	Indikasi Kecurangan dalam Pelayanan	3,71	92,65
3	Praktik Pemberian Imbalan Uang/Barang	3,75	93,63
4	Praktik Pungutan Liar (Pungli)	3,79	94,85
5	Praktik Percaloan/Perantara/Biro	3,73	93,14
Jumlah Indeks Persepsi Antikorupsi		3,74	93,53



Gambar 4. Nilai Indeks Persepsi Antikorupsi per Unsur

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi data, diperoleh nilai IPAK sebesar **3,74** atau **93,53%** yang termasuk ke dalam kategori **Bersih dari Korupsi (88,31 – 100)**. Angka yang diperoleh lebih besar 0,03 atau 0,70% dibandingkan nilai IPAK pada Triwulan 2. Kenaikan tersebut membuktikan bahwa BPSI Tanaman Serealia telah berhasil menunjukkan kepada pengguna jasa bahwa penyelenggaraan birokrasi di BPSI Tanaman Serealia bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun terlihat unsur U2 yaitu **Indikasi Kecurangan dalam Pelayanan** mendapatkan indeks penilaian yang paling kecil sebesar 3,71 atau 92,65% dibandingkan dengan unsur lainnya. Jika memperhatikan hasil survei sebanyak **3 responden** memilih **cukup setuju**, **24 responden** memilih **setuju**, dan **41 responden** lainnya memilih **sangat setuju**. Hal ini menunjukkan BPSI Tanaman Serealia telah menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Sehingga dalam praktik keseharian **tidak akan pernah ditemui petugas yang melakukan penyelewengan/kecurangan** dalam memberikan pelayanan seperti penyerobotan antrean, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda serta praktik penyelewengan lainnya. Karena sekecil apapun bentuk penyelewangan akan berakibat fatal bagi pengguna jasa, instansi penyelenggara, dan negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

1. Secara umum, hasil survei persepsi kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sereal memperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3,55** atau masuk kategori **Sangat Baik** (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Dengan demikian, petugas pelayanan BPSI Tanaman Sereal telah memberikan pelayanan dengan baik, transparan, bersih, dan akuntabel.
2. Selanjutnya, survei persepsi antikorupsi mendapatkan nilai Indeks Persepsi Antikorupsi sebesar **3,74** atau masuk kategori **Bersih dari Korupsi** (kisaran nilai 3.26 - 4.00). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan telah mempercayai BPSI Tanaman Sereal sebagai penyelenggaraan layanan yang bebas dari korupsi.
3. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan. Sehingga pelayanan dapat dilaksanakan **Tepat Waktu**. Kemudian melakukan perbaikan pada pengawasan dan perbaikan prosedur guna meminimalisasi adanya praktik penyelewengan dalam memberikan layanan atau **Indikasi Kecurangan dalam Pelayanan**.

B. Tindak Lanjut

1. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik sebesar **3,55** atau **88,66%** dan hasil Survei Persepsi Antikorupsi sebesar **3,74** atau **93,53%** Hasil survei ini perlu dipertahankan dengan melakukan peningkatan kualitas layanan kepada Masyarakat.
2. Rencana tindak lanjut pada unsur-unsur yang memperoleh nilai terkecil adalah dengan menyelenggarakan pelatihan budaya pelayanan prima (*services excellent*), melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh pada

semua lini pelayanan publik serta meningkatkan pengendalian atas penugasan pengawasan secara berjenjang.

LAMPIRAN

A. Data Responden

No	Nama	Layanan
1	Iwal Mansiz Tanjung	Perpustakaan
2	Sitti Raodah Garuda	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
3	Sution, S.P, M.P	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
4	Mohamad Fadli	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
5	Ahmad Muliadi	Informasi Teknologi
6	Evi Ayunita	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
7	Taufiq Hidayatullah, M.Sc.	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
8	Novendra	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
9	Hariy Laksamana	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
10	Feriadi, SP., M.Si.	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
11	Muhtar	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
12	Zenitha	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
13	Mitha Sari	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
14	Suryadi Z	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
15	Rayya Eka Fauzia	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
16	Mustika Pradhina Tungga Dewi	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
17	A. Dwi Zahratul Aini	Magang/PKL
18	Husnul Mar'ah	Magang/PKL
19	Bohari	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
20	Irwan Saprialdi	Magang/PKL
21	Kadek Restudy Jaya	Magang/PKL
22	Muhammad Farhan Mustama	Magang/PKL
23	Karlina Syahrudin	Laboratorium Pengujian
24	Asmary Muis, S.P., M.Sc.	Informasi Teknologi
25	Firman Santhy Galung	Informasi Teknologi
26	Ajang Maruapey	Informasi Teknologi
27	Eko Kristanto, S.Pt	Informasi Teknologi
28	Lili Sugiyarto	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
29	Nurul Fitrihasari R	Informasi Teknologi
30	Fatmawati	Magang/PKL
31	Risna	Magang/PKL
32	Sitti Nurhalisa. Br	Magang/PKL
33	Nur Inda Tahir	Magang/PKL
34	Astiyani	Magang/PKL
35	Fajar	Magang/PKL
36	Hermayuni	Magang/PKL
37	Ahmad Anugrah Wahidin	Magang/PKL
38	Zenitha Sivastr	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
39	Jumrah	Magang/PKL
40	Nurqalbi Khaerunnisa	Magang/PKL
41	Marwah	Magang/PKL
42	Nabila Resky Khairunnisa	Magang/PKL
43	Marwah Arafah	Magang/PKL
44	Marwah Arafah	Magang/PKL
45	Tia Indi Marsya	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
46	Septia Nuril	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
47	Alfian Rizqiansyah	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
48	Abdi Pramudya	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
49	Frans Damanik	Informasi Teknologi
50	Nursyamsih	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
51	Dr. Hj. Fitriwati Syamsuddin., S.Pd., M.Si	Kunjungan/Studi Banding
52	Muhammad Eko Prasetyo	Unit Pengelola Benih Sumber (Pembelian Benih)
53	Gilang Febriansyah	Kunjungan/Studi Banding
54	Rahmadani	Kunjungan/Studi Banding
55	Muh.Syaifulloh	Kunjungan/Studi Banding

No	Nama	Layanan
56	Tison	Kunjungan/Studi Banding
57	Nurul Khairu Zhakiah	Kunjungan/Studi Banding
58	Muh Nur Hafid	Kunjungan/Studi Banding
59	Darwana	Kunjungan/Studi Banding
60	M. Farid Harunnas	Kunjungan/Studi Banding
61	Nur Hasnida Sani	Kunjungan/Studi Banding
62	Nurul Djuliah	Kunjungan/Studi Banding
63	Zalzabila	Kunjungan/Studi Banding
64	Hevita Amelia	Kunjungan/Studi Banding
65	Riska Aulia	Kunjungan/Studi Banding
66	Dilla	Kunjungan/Studi Banding
67	Ahmad Reza Alwing	Kunjungan/Studi Banding
68	Aditya Pratama	Kunjungan/Studi Banding

B. Tautan dan Barcode Survei SPKP Triwulan 3



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BPSI TANAMAN SEREALIA**

Survei SPKP/SPAK TW II

BPSI Tanaman Serealia



atau klik bit.ly/SPKPSerealiaTW2

SIGAP: Senyum, Ikhlas, Gesit, Aktif, Profesional
www.serealia.bsip.pertanian.go.id